

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PEGAWAI SKPK

Aldi Septian Putra

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: aldi45388@gmail.com

Afrah Junita

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Iqlima Azhar

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Korespondensi penulis: aldi45388@gmail.com

Abstract. *This systematic literature review aims to determine the effect of performance-based budgeting, transparency and accountability on employee performance at SKPK Langsa. The method of writing systematic literature review articles is the library search method which originates from online media such as Google Scholar, Mendeley and other academic media. The results of this systematic literature review are 1) performance-based budgeting influences the performance of SKPK employees; 2) transparency affects the performance of SKPK employees; 3) accountability affects the performance of SKPK employees.*

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Transparency, Accountability, Employee Performance.*

Abstrak. *Systematic literature review ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pegawai di SKPK Langsa. Metode penulisan artikel systematic literatur review ini adalah dengan metode library search yang bersumber dari media online seperti google scholar, mendeley dan media akademik lainnya. Hasil systematic literature review ini adalah 1) anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK; 2) transparansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK; 3) akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK.*

Kata kunci: *Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Pegawai.*

LATAR BELAKANG

Kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Kinerja atau sering disebut prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu dalam pengukuran kinerja tidak boleh hanya dengan berdasarkan penyerapan anggaran akhir tahun berjalan. Pengukuran kinerja haruslah sesuai dengan visi dan misi dalam suatu organisasi agar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi tersebut (Pratiwi, 2018).

Pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik memerlukan akuntabilitas, transparansi keuangan daerah agar kinerja pemerintah daerah baik dan memuaskan. Penerapan aturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan menggunakan anggaran sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja (Ulya & Astuti, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sistem penganggaran disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja, sering disebut sistem penganggaran berbasis kinerja, diterapkan pemerintah bertujuan sebagai upaya merespon tingginya tuntutan masyarakat akan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas publik (Afriady & Rahmah, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pegawai di SKPK Langsa. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lanjutan melalui *literature review* terkait, dengan Judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai SKPK ”.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Pegawai

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil (Verasvera, 2016). Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi (Radiansyah et al., 2022).

Anggaran Berbasis Kinerja

Performance budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi (Pratiwi, 2018).

Anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Utami & Machpudin, 2017).

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Ulya & Astuti, 2020).

Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Utami & Machpudin, 2017).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Novatiani dkk (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah
2.	Adiwirya dan Sudana (2015)	Akuntabilitas, Transparansi, dan	Penelitian ini	Penelitian ini

		Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar	menggunakan metode kuesioner dan Regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini.	menyimpulkan bahwa akuntabilitas transparansi dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja perangkat daerah.
3.	Pratiwi (2018)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)	Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan positif yang kuat dan searah serta memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
4.	Ulya dan Astuti (2018)	Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner (angket) dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS	Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja kinerja pemerintah daerah.
5.	Radiansyah dkk (2022)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Laporan Keuangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode survei.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan.
6.	Jatmiko (2020)	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, kinerja pemerintah daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

7.	Afriady dan Rahmah (2022)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Penghargaan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, reward, punishment dan religiusitas memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai SKPK

Anggaran berbasis kinerja akan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi apabila organisasi memiliki informasi finansial yang tersedia dengan lengkap guna mendukung perencanaan anggaran, dan anggaran tersebut harus dapat menyajikan gambaran yang jelas mengenai pembiayaan dari setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam penyusunan anggaran telah selaras dengan tujuan, visi dan misi organisasi dan menggambarkan output dan outcome serta berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu penganggaran yang dilaksanakan telah berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yaitu transparan dan akuntabel, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, maka akan mampu meningkatkan kinerja organisasi (Afriady & Rahmah, 2022).

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Selain itu, hal ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh anggaran berbasis kinerja yang searah dengan peningkatan kinerja atau dengan kata lain semakin tinggi penerapan anggaran berbasis

kinerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja aparatur pemerintah daerah Pratiwi, (2018). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Adiwirya & Sudana (2015), Pratiwi, (2018), Radiansyah et al., (2022) dan Afriady & Rahmah (2022), yang menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai SKPK

Transparansi dalam pengelolaan pemerintah dapat menekankan kepada pemerintah untuk terbuka akan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi yang akurat dan jujur mengenai kebijakan dan program pemerintah. Dengan adanya transparansi dalam aktivitas urusan publik salah satunya di bidang administrasi keuangan dapat memudahkan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian pemerintah akan menampilkan pemerintah akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kinerja pemerintah daerah pun akan meningkat (Jatmiko, 2020).

Menurut Novatiani et al., (2019), bila aparatur pemerintah menerapkan transparansi maka akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya. Dengan kata lain semakin tinggi transparansi pada aparatur pemerintah maka akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Novatiani et al., (2019), Adiwirya & Sudana (2015), Ulya & Astuti (2020), dan Jatmiko (2020), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai SKPK

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak. Akuntabilitas adalah amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan, dan terdapat penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut yang dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas sebaik mungkin. Implementasi akuntabilitas diyakini akan mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan (Novatiani dkk, 2019).

Menurut Astuti dan Alya (2018) adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran yang meliputi adanya kesesuaian jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik, dan tidak adanya penyalahgunaan jabatan selama periode pemerintahan. Dengan kata lain semakin tinggi akuntabilitas pada aparatur pemerintah maka akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Novatiani et al., (2019), Adiwirya & Sudana (2015), Ulya & Astuti (2020), dan Jatmiko (2020), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai SKPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pegawai SKPK.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai SKPK, selain dari penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja pegawai SKPK selain yang variabel yang diteliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti pengawasan internal, penghargaan, sanksi, kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628.
- Afriady, A., & Rahmah, A. N. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Penghargaan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 181–193.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Pratiwi, U. G. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4).
- Radiansyah, A., Auliddiah, R., & Suhardi. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Laporan Keuangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–13.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 63–79. <https://doi.org/10.31942/akses.v13i2.3242>
- Utami, W., & Machpudin, H. A. A. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 2(4).
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.